

KOMPARASI KEMISKINAN MONETER DAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU

Ariston S Sihite¹⁾, Dahlan Tampubolon²⁾, Deny Setiawan²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : sihiteariston334@gmail.com

*The Conditions Of Monetary Poverty And Multidimensional Poverty Are In
Limapuluh Kota Pekanbaru*

ABSTRACT

This research was conducted in Limapuluh Kota District, Pekanbaru. This study aims to see how the conditions of monetary poverty and multidimensional poverty are in Limapuluh Kota Pekanbaru. This study uses secondary data from various agencies. The method used in this study is the MPA (multidimensional province approach) method with successive phasing analysis techniques with a descriptive approach in the MPA method using tables and graphs. From the results of the monetary poverty study, it can be seen that the poverty reduction rate at the Pekanbaru city level is also followed by a decrease in the poverty rate at the Limapuluh Subdistrict level. Multidimensional poverty is seen from education indicators, namely the NER level, the pure participation rate at the high school level from year to year, always increasing and effective policy interventions seen from the trendline analysis, other indicators are health, including the level of under-five malnutrition, the rate has increased and decreased in the last five years, then the employment indicator is seen from the labor force participation from year to year, the participation rate has always increased and the trendline analysis of policy interventions shows effective interventions. The next indicator of basic infrastructure is seen from households with decent drinking water, it can be seen that the indicators of decent drinking water from year to year always increase and the effect of policy interventions can be seen from trendline analysis

Keywords : Multidimensional, Analysis Trend Lien

PENDAHULUAN

Pemerintah sangat sadar bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam upaya mencapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur Mereka berusaha keras untuk mengurangi angka kemiskinan akan tetapi upaya yang dilakukan

pemerintah menemui kesulitan dalam beberapa tahun belakangan

Masalah ketepatan dalam pengukuran kemiskinan harus sangat diperhatikan alasan yang mendasari yaitu berhubungan dengan efektifitas dari kebijakan reduksi kemiskinan (Wardhana, 2010). Jika dilihat pada kasus Indonesia, target-target reduksi kemiskinan selalu menjadi prioritas

pembangunan. Melalui dokumen perencanaan yaitu RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014, Rencana Kerja Program Tahunan (RKPT), dan dokumen APBN di targetkan kemiskinan turun hingga 7,5 persen dari jumlah penduduk (Bappenas, 2008). Target tersebut selalu mendapatkan hasil yang baik secara data, terbukti bahwa kemiskinan pasca krisis 1998 selalu mengalami tren penurunan yang baik, dan sedikit meningkat saat krisis 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, permasalahan yang masih mengganjal yaitu ketepatan prediksi dari tingkat kemiskinan. Selama ini perhitungan kemiskinan hanya menggunakan indikator pendapatan dan pengeluaran konsumsi (*monetary poverty*). Sen (2000) Diaz (2003) menganggap metode tersebut hanya memotret sedikit dari banyaknya persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan tidak hanya menyangkut daya beli namun lebih luas seperti keterbatasan akses pada pendidikan, kesehatan dan hidup yang layak (Wardhana, 2010; Budiantoro)

Menurut Nolan dan Whelan (2011) pengukuran kemiskinan secara non moneter dapat memperlihatkan secara konkrit apa yang disebut dengan kemiskinan itu sendiri. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan moneter menunjukkan kegagalan dalam mengidentifikasi orang miskin dan indikator non moneter dapat diandalkan untuk memperlihatkan siapa yang disebut orang miskin (Alkire et al, 2015:8-9).

Sebuah Pengukuran pendekatan dengan kemiskinan

multidimensi muncul karena adanya kritik terhadap pendekatan ekonomi semata dalam mengukur kemiskinan. Konsep ini pada mulanya dikemukakan oleh Amartya Sen yang menyatakan bahwa kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi (Perkumpulan Prakarsa, 2013: 1) Pengukuran kemiskinan secara multidimensi dapat melihat kemiskinan secara menyeluruh dan mampu menghasilkan kebijakan pemberantasan kemiskinan tepat sasaran Pendekatan ini juga dapat dijadikan standar evaluasi mengenai program yang telah dilakukan pemerintah.

Studi yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan secara moneter sering menemukan hasil berbeda bila dibandingkan dengan kondisi yang dialami oleh penduduk miskin. Kaztman (1989) menemukan bahwa 13% rumah tangga di Montevideo Uruguay adalah penduduk dengan pendapatan miskin namun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan 7,5% berada dalam kasus sebaliknya, mereka merupakan penduduk tidak miskin namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ruggeri Laderchi (1997) menyimpulkan berdasarkan data di Chili bahwa pengukuran kemiskinan pendapatan itu sendiri tidak menyampaikan semua informasi yang menarik jika tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemiskinan. Stewart, Saith, dan Harriss-White (2007) menemukan bahwa 53% anak-anak kurang gizi di India dalam penelitian tersebut tidak tinggal di rumah tangga yang mengalami kemiskinan pendapatan dan 53% anak-anak yang tinggal di

rumah tangga berpenghasilan miskin tidak kekurangan gizi (Alkire et all, 2015).

Femomena yang terjadi di kota dan kecamatan pekanbaru terdapat angka penurunan kemiskinan yang belum signifikan pada tahun 2013 samapai pada tahun 2015 adanya perbedaan dalam melihat kemiskinan membuat pengambilan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan berbeda pula.

Tabel 1 Garis Kemiskinan dan Jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru 2013-2019

Tahun	Garis kemiskinan(rupiah)	Jumlah Penduduk miskin(Ribu jiwa)
2013	381 287	32,46
2014	399 451	32,29
2015	416 479	33,76
2016	435 082	32,49
2017	473 788	33,09
2018	499 852	31,82
2019	516 368	28.20

Permasalahan kemiskinan juga terjadi di salah satu Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru Tepatnya di Salah satu Kecamatan yang ada Di Kota Pekanbaru Yaitu Kecamatan Limapuluh Kecamatan yang terdiri yang dari empat (4) kelurahan, 30 RW dan 121 RT. Empat Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Tanjung Rhu dan Kelurahan Pesisir dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2019 sebanyak 10.306 rumah tangga Jumlah penduduk Kecamatan Limapuluh mencapai 43.461 jiwa pada tahun 2019 angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,59 persen dari tahun 2018 dilihat dari kategori diatas maka penduduk

kecamatan lima puluh berada pada kategori Sangat Padat karena Kepadatan Penduduknya lebih dari 400 jiwa/ km² yaitu 10.584 jiwa/ Km² dan yang menyebabkan timbulnya banyak Kekumuhan wilayah.Salah satunya berdampak pada jumlah rumah tidak layak huni dan Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpai di wilayah sepanjang kolong-kolong jembatan, dan tepian sungai.

Berbagai permasalahan dapat di jumpai juga di kecamatan ini masalah seperti penyediaan air bersih dan gizi yang mengakibatkan berbagai penyakit yang tibul berikut data penyakit yang banyak ditangani oleh puskesmas kecamatan lima puluh.

TINJAUAN PUSTAKA

Kaitan kesejahteraan dengan kemiskinan tercermin dari pengukuran kesejahteraan menggunakan garis kemiskinan, yaitu dengan standar US\$1 atau US\$2 per kapita per hari. Semakin besar persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan mencerminkan semakin rendah taraf sejahtera masyarakat dalam suatu negara (Rahardjo, 2016:).

Ahli ekonomi Vilfrido Pareto menyatakan kesejahteraan akan tercapai apabila tercipta situasi optimal. Situasi optimal terjadi apabila tidak ada individu dapat berbuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk.

Amartya Sen menyatakan bahwa asal sejahteranya individu ialah kemampuan untuk bisa berfungsi layak dalam masyarakat. Kondisi sejahtera yang dimaksud adalah saat terpenuhinya kebutuhan

dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, penghasilan, kebebasan dalam memilih, dan mendapat perlindungan dari resiko yang mengancam hidupnya Nuryitmawan (2016:).

Upaya Sen dan Ul Haq untuk menolak PDB sebagai tolok ukur kesejahteraan dilakukan dengan merancang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990. IPM memuat 3 hal yakni pendapatan per kapita, usia harapan hidup, dan angka partisipasi sekolah sebagai alternatif untuk melihat kesejahteraan. IPM memuat pemikiran bahwa rakyat merupakan kekayaan sebenar-benarnya dari sebuah negara dan pembangunan harus membuat lingkungan yang memungkinkan penghuninya untuk menikmati hidup panjang, sehat, dan berdaya cipta (Fiaramonti, 2017).

Terdapat berbagai pengertian mengenai kemiskinan Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan bahan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak (Limbong, 2011: 209). Schiller menyatakan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Suyanto, 2013: 2).

Adapun John Friedman mengemukakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud adalah: modal produktif/aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik untuk mencapai kepentingan bersama, network/jaringan sosial untuk memperoleh 19 pekerjaan, barang, pengetahuan dan keterampilan yang

memadai, dan informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto, 2013,23)

Adapun penyebab kemiskinan berbagai pendapat muncul mendebatkan penyebab kemiskinan Menurut lembaga penelitian SMERU, kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab kemiskinan terdiri dari:

- 1) Gagal dalam perolehan hak milik, terutama tanah dan modal;
- 2) Ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana yang jumlahnya terbatas;
- 3) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
- 4) Terdapat perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- 5) Adanya perbedaan SDM dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- 6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;

Tidak adanya good governance

Kemiskinan moneter di Indonesia diukur dengan menggunakan standar dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, kemiskinan berarti ketidakmampuan dalam memenuhi standar kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan (Khomsan et al, 2015:12).

Beberapa ahli mengemukakan ciri-ciri kemiskinan.

Ciri-ciri kemiskinan menurut Gunnar Myrdal dalam Prayitno & Arsyad

(1987: 36-37) adalah: Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tidak memiliki faktor produksi sendiri, sehingga membuat kemampuan menghasilkan pendapatan menjadi terbatas.

- 1) Mereka pada umumnya tidak memiliki kekuatan untuk memperoleh aset dengan kekuatan sendiri. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak tamat Sekolah Dasar. Ketidakmampuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan waktu yang tersedia digunakan untuk bekerja sehingga w Banyak penduduk miskin yang berada di pedesaan dan memiliki tanah garapan kecil atau bahkan tak memiliki sama sekali. Pekerjaan mereka
- 3) umumnya buruh tani ataupun pekerja kasar di luar sektor pertanian.
- 4) Berusia muda namun tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup.
- 5) aktu untuk belajar menjadi tidak ada

Chambers menyebutkan mata rantai di atas sebagai perangkap kemiskinan menurut chambers akan ada pola kemungkinan kemiskinan ketidakberdayaan kerawanan Kelemahan fisik isolasi hubungan kausal yang dapat membentuk jaringan yang mampu memerangkap orang menjadi miskin. Secara lengkap, kelima faktor tersebut adalah:

- 1) Kemiskinan, adalah faktor yang paling penting. Kemiskinan mengakibatkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menghasilkan ukuran tubuh yang lebih kecil, kekurangan gizi membuat daya tahan tubuh menjadi rendah sehingga mudah terserang penyakit, padahal tidak memiliki biaya untuk berobat. Keadaan seperti ini membuat orang tersisih dan akhirnya menjadi rentan. Pada akhirnya orang miskin menjadi tidak berdaya karena kehilangan kesejahteraan dan memiliki kedudukan yang rendah.
- 2) Kelemahan jasmani, mendorong kemiskinan melalui berbagai cara: tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah. Tubuh yang lemah juga membuat seseorang menjadi tersisih karena ia tidak mampu mengikuti pertemuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Jasmani yang lemah memperpanjang kerentanan karena terbatasnya kemampuan untuk mengatasi krisis. Tubuh yang lemah juga membuat orang merasa tidak berdaya, kekurangan waktu untuk memperjuangkan hak politiknya karena orang yang kelaparan tidak akan berbuat macam-macam.
- 3) Isolasi, karena pendidikan dan tempat tinggal yang jauh. Kondisi ini turut menopang terjadinya kemiskinan. Hal ini disebabkan bantuan dan

pelayanan pemerintah tidak dapat menjangkau mereka. Orang yang buta huruf akan jauh dari akses ekonomi.

- 4) Kerentanan, faktor ini berkaitan dengan kemiskinan karena orang terpaksa menjual kekayaan mereka, berkaitan pula dengan kelemahan jasmani untuk menangani kelemahan darurat, berkaitan dengan isolasi berupa upaya mengasingkan diri, dan ketidakberdayaan dicerminkan dengan bergantung pada orang lain
- 5) Ketidakberdayaan, pada akhirnya mendorong proses pemiskinan. Orang yang tidak berdaya sulit memiliki akses terhadap bantuan maupun pendidikan. Hal ini akan membuat orang menjadi semakin terisolir dari bantuan pemerintah yang membuatnya rentan

Bank Dunia (1980) menyatakan bahwa kemiskinan sendiri memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar para pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemberantasan kemiskinan. Aspek tersebut antara lain:

Kemiskinan Multidimensi

Pengukuran pendekatan dengan kemiskinan multidimensi muncul karena adanya kritik terhadap pendekatan ekonomi semata dalam mengukur kemiskinan. Konsep ini pada mulanya dikemukakan oleh Amartya Sen yang menyatakan bahwa kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi (Perkumpulan Prakarsa, 2013: 1). Tidak hanya

Amartya Sen, aspek multidimensi dalam persoalan

Penghitungan kemiskinan multidimensi dapat diukur dengan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) atau Multidimensional Poverty Index (MPI), yang dikaji oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), Universitas Oxford Metode yang diperkenalkan oleh Sabine Alkire dan James Foster, peneliti dari *Oxford Poverty & Human Development Initiative*. Metode Alkire Foster mengidentifikasi si miskin berdasarkan dari deprivasi yang dialami oleh si miskin. Informasi tersebut akan membuat kemiskinan dapat dipecah (misal berdasarkan letak geografis, etnis, gender, maupun kelompok sosial lain) untuk mengungkapkan bagaimana orang-orang miskin (OPHI, 2015:

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode terstruktur yang terdiri dari lima tahapan yang membantu mengidentifikasi dan menerapkan solusi bagi hambatan untuk mempercepat kemajuan SDGs dalam pengentasan kemiskinan

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berkenaan dengan kemiskinan dan indikator indikator yang ada dalam kemiskinan multidimensi dan kemiskinan moneter.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara pentahapan secara berurutan dengan pendekatan deskriptif, sesuai data yang ada dengan menggunakan tabel grafik dengan pada kemiskinan moneter dilihat dari persentase

penduduk miskin kecamatan Limapuluh dan untuk melihat kemiskinan multidimensi yaitu dengan menggunakan metode Multidimensial poverty Approach(MPA) Indikator yang dipilih dalam penelitian ini adalah dari pendidikan dengan melihat tingkat partisipasi murni(APM) di tingkat SMA dan kemudian di bandingkan dari tingkat kecamatan ke tingkat kota selanjutnya indikator kesehatan yaitu dengan melihat tingkat prevalensi gizi buruk

Terlebih dahulu memilih indikator yang dapat di nilai tepat dalam melihat bagaimana kondisi kemiskinan yang ada di daerah tersebut setelah indikator dapat di indentifikassi maka selanjutnya mengikuti pentahapan yang ada dalam dalam metode yang digunakan yaitu metode multidimensial poverty approach(MPA) adapun tahapan yang ada dalam metode tersebut adalah

1. Tahap1: Identifikasi kemiskinan mengikut multidimensional poverty approach,dengan memasukkan indikator-indikator kemiskinan multidimensi
2. Tahap2: Identifikasi intervensi kebijakan strategi dan hambatan implementasi intervensi strategi pengentasan kemiskinan Dalam tahapan ini dilakukan kajian terhadap kesesuaian antara rencana pemerintah daerah
3. Tahap3: Pemilihan dan penentuan alternatif strategi pengentasan kemiskinan berbasis MPA
4. Tahap4: Rekomendasi strategi pengentasan kemiskinan
5. Tahap5: Rencana implementasi strategi pengentasan kemiskinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Moneter

Kemiskinan moneter di kecamatan limapuluh dihitung dengan menggunakan garis kemiskinan yang dimana garis kemiskinan dari tahun ke tahun selalau mengalami peningkatan Dari hasil data di BPS di dapati penurunan dari persentase tingkat kemiskinan moneter di tingakat kota Pekanbaru juga diikuti penurunan di tingkat Kecamatan Limapuluh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Kemiskinan Multidimensi

1. Pendidikan sebagai salah satu dimensi kemiskinan merupakan faktor yang sangat menentukan kondisi kemiskinan disuatu wilayah Untuk memetakan kondisi pendidikan di kecamatan limapuluh dapat dilihat dari sisi akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Tingkat efektivitas intervensi kebijakan terhadap perkembangan APM SMA/MA di kecamatan limapuluh dari Tahun 2015–2019 tampak efektif. Hal ini ditunjukkan dengan analisis trendline terjadi peningkatan meski tidak terlalu signifikan

Tabel 1

Tahun	Indeks waktu (t)	APM (A)	Analisis trendline
2015	1	63.59	$331,38+3,236(1) = 334,274$
2016	2	64.03	$331,38+3,236(2) = 337,852$
2017	3	69.26	$331,38+3,236(3) = 341,088$
2018	4	70.07	$331,38+3,236(4) = 344,324$
2019	5	74.13	$331,38+3,236(5) = 347,560$

2. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. penduduk yang berpendapatan rendah atau miskin cenderung sulit untuk memperoleh akses terhadap pelayanan dasar kesehatan. Dimensi kesehatan salah satunya dalah prevalensi balita gizi buruk. Perkembangan antar waktu. Prevalensi Balita Gizi Buruk di kecamatan limapuluh dari Tahun 2015 –2019 menunjukkan tren peningkatan meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2018. Pada Tahun 2015 terdapat 0.3 dengan status gizi buruk, kemudian terjadi fluktuasi sampai akhirnya meningkat di Tahun 2016 dan tahun 2017 Selanjutnya analisis dilakukan analisis trendline untuk melihat intervensi kebijakan terhadap perkembangan prevalensi balita gizi buruk di kota Pekanbaru . Melalui analisis trendline terhadap perkembangan prevalensi balita gizi buruk di Kecamatan limapuluh pada periode tahun 2015 –2019 didapati bawa intervensi kebijakan menunjukan indikasi efektif berikut hasil dari analisis trendline di kecamatan limapuluh.

Tabel 2

Tahun	Indeks waktu(t)	Gizi buruk(a)	Analisis trenline
2015	1	0.3	$1.109 + 0,163(1) = 1,272$
2016	2	0.5	$1.109 + 0,163(2) = 1,435$
2017	3	0.7	$1.109 + 0,163(3) = 1,598$
2018	4	0.5	$1,109 + 0,163(4) = 1,761$
2019	5	0.6	$1,109 + 0,163(5) = 1,924$

3. Indikator utama sektor ketenagakerjaan yang akan dianalisis adalah Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Ketiga indikator ini diharapkan dapat mewakili kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau sehingga dapat diidentifikasi secara lebih mendalam sebagai bahan pertimbangan penyusunan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. TPAK antara pria dan wanita berbeda. Biasanya TPAK wanita lebih rendah dibandingkan dengan TPAK pria. Hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai di masyarakat bahwa pria memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah. Dengan melihat analisis trendline perkembangan TPAK di kecamatan limapuluh selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari 2015 –2019 dapat dilihat bahwa secara umum terjadi peningkatan tingkat partisipasi. Hal ini menunjukkan efektivitas

yang positif antara intervensi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan TPAK meski kenaikannya tidak signifikan. Berikut adalah table analisis trendline TPAK di kecamatan limapuluh:

Tabel 3

Tahun	Indeks waktu(t)	Tpak (A)	Analisis trendline
2015	1	60.34	$310.01+1.103(1)=311.11$
2016	2	61.34	$310.01+1.103(2)=312.21$
2017	3	62.74	$310.01+1.103(3)=313.31$
2018	4	63.81	$310.01+1.103(4)=314.42$
2019	5	65.09	$310.01+1.103(5)=315.52$

4. Pemenuhan infrastruktur dasar merupakan salah satu dimensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat multidimensi (Multidimensional Poverty Approach). Dengan pendekatan MPA, infrastruktur dasar dikategorikan sebagai dimensi standar kualitas kehidupan meliputi akses terhadap air minum yang bersih dan layak; akses terhadap sanitasi yang layak dalam rumah tangga; akses terhadap listrik; jenis bahan bakar untuk memasak; jenis lantai rumah dan kepemilikan asset posisi relatif kecamatan limapuluh terkait proporsi rumah tangga dengan air minum layak adalah sebesar 92.41 pada tahun 2015. Di sisi lain, baha intervensi kebijakan selama Tahun 2015 –2019 menunjukkan efektivitas yang positif terhadap peningkatan proporsi rumah tangga dengan air minum layak meski tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan

kecenderungan peningkatan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 4

Tahun	Indeks waktu(t)	Air minum layak(a)	Analisis trendline
2015	1	92.41	$91.789+0.927(1)=92.716$
2016	2	186.18	$91.789+0.927(2)=93.643$
2017	3	287.28	$91.789+0.927(3)=94.57$
2018	4	384	$91.789+0.927(4)=95.497$
2019	5	477.52	$91.789+0.927(5)=96.424$

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah.

1. Kemiskinan moneter di kecamatan limapuluh dihitung dengan menggunakan garis kemiskinan yang dimana garis kemiskinan dari tahun ke tahun selalau mengalami peningkatan. Dari hasil data di BPS di dapat penurunan dari persentase tingkat kemiskinan moneter di tingkat kota Pekanbaru juga diikuti penurunan di tingkat Kecamatan Limapuluh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
2. Adapun dari indikator kemiskinan multidimensi yaitu yang pertama tingkat APM(angka partisipasi murni) di tingkat SMA didapati tingkat partisipasi yang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan terdapat intervensi kebijakan yang efektif yang dilihat dari perkembangan analisis trendline, proporsi rumah tangga dengan a
3. Indikator kesehatan dengan melihat tingkat gizi buruk yang dimana di dapat bahwa angka penurunan di tingkat kota dan di tingkat kecamatan mengalami peningkatan
4. Indikator ketenagakerjaan menunjukkan tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari setiap tahunnya peningkatan di tingkat kota juga di ikuti peningkatan di tingkat kecamatan Dengan melihat analisis trendline perkembangan TPAK di kecamatan limapuluh selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari 2015 –2019 dapat dilihat bahwa secara umum terjadi peningkatan tingkat partisipasi. Hal ini menunjukkan efektivitas yang positif antara intervensi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan TPAK meski kenaikannya tidak signifikan.

5. Indikator infrastruktur dasar Di sisi perkembangan antar waktu, proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kecamatan lima puluh dari Tahun 2015 –2019 mengalami fluktuasi Dilihat dari analisis trendline didapati baha intervensi kebijakan selama Tahun 2015 –2019 menunjukkan efektivitas yang positif terhadap peningkatan proporsi rumah tangga dengan air minum layak meski tidak signifikan.

Saran

Adapun aran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah kecamatan limapuluh dan kota pekanbaru harus senantiasa memperhatikan masalah kemiskinan. Bila terkait dengan kemiskinan moneter, maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempertahankan daya beli yang dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu, Pemerintah harus menjaga tingkat inflasi. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan bantuan untuk hidup

penduduk miskin. Bantuan dapat berupa bahan pangan seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan sifatnya saling melengkapi kebutuhan hidup penduduk miskin.

2. Pemerintah perlu memikirkan kebijakan agar penduduk yang sedang mencaari pekerjaan dapat mudah mendapatkan pekerjaan seiring meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja
3. Pemerintah perlu bersinergi dengan lembaga sosial dan instansi swasta dalam hal pemberian bantuan bagi warga miskin agar mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, Sabina, *et all.* (2015). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis.* Oxford University Press: New York.
- Fiaramonti, Lorenzo. (2017). *Problem Domestik Bruto (Terjemahan Lita Soerjadinata).* Tangerang Selatan: Marjin Kiri. (Edisi asli diterbitkan tahun 2013 oleh Zed Books Ltd. London.
- Khomsan, Ali, *et all.* (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nuryitmawan, Tegar Rismanuar. (2016). *Studi Komparasi Kemiskinan di Indonesia: Multidimensional Poverty dan Monetary Poverty.* Jurnal

*Ilmu Ekonomi Terapan, Juni
2016*

*Penanganannya. Malang: In-
Trans Publishing*

- Rahardjo, Dawam. (2016). *Kebijakan Kesejahteraan Sosial Dalam Satu Dasawarsa Terakhir. Dalam Ah, Maftuchan, Mickael B Hoelman, & Victoria Fanggidae (Eds). Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Manusia*
- suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi*
- Wardhana, D. (2010). *Multidimensional poverty dynamics in Indonesia (1993-2007). School of Economics, University of Nottingham.*
- Perkumpulan Prakarsa (2013) *Multidimensi Proverty Indeks(MPI) Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*